

ABSTRAK

Munculnya gelandangan secara struktural dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang menimbulkan dampak berupa terasingnya sebagian kelompok masyarakat dari sistem kehidupan. Pada penelitian ini membahas keberadaan gelandangan yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe terutama di tempat umum, hal ini bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan pasal 45 dan 46 ayat 1. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menangani dan meningkatkan kesejahteraan gelandangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle, khususnya fokus pada aspek *Content of Policy* dan *Context of Implementation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun tersebut belum optimal, disebabkan oleh kurangnya anggaran, fasilitas, serta minimnya sinergi antar lembaga. Selain itu, faktor budaya, kurangnya perhatian dari keluarga dan lemahnya pengawasan turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta penyediaan sarana rehabilitasi sosial yang memadai untuk mendukung efektivitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan gelandangan di Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penanganan, Gelandangan

ABSTRACT

The emergence of homelessness is structurally influenced by an economic system that results in the alienation of certain groups from the social system. This research discusses the presence of homeless individuals still found in public areas of Lhokseumawe City, which contradicts Aceh Qanun Number 11 of 2013 concerning Welfare, Articles 45 and 46, paragraph 1. The aim of this study is to understand the implementation of policies issued by the Lhokseumawe City Government in addressing and improving the welfare of the homeless. This research employs a qualitative method with a descriptive analysis type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data obtained are analyzed through several steps: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis is conducted using Grindle's policy implementation theory, focusing specifically on the aspects of Content of Policy and Context of Implementation. The results of the study indicate that the implementation of the Qanun has not been optimal, due to a lack of budget, facilities, and minimal synergy among institutions. Additionally, cultural factors, lack of family attention, and weak supervision also hinder the implementation of this policy. This study recommends strengthening cross-sector coordination, enhancing the capacity of implementing agencies, and providing adequate social rehabilitation facilities to support the effectiveness of policies in addressing homelessness issues in Lhokseumawe City.

Keywords: *Implementation, Policy, Handling, Homelessness.*